

## BAB IV

### OBJEK PENELITIAN

#### 4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi yang terdapat di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Pulau Sulawesi dengan ibu kotanya Kendari. Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 17 Kabupaten/Kota ini secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa di antara  $02^{\circ}45'$  -  $06^{\circ}15'$  Lintang Selatan dan  $120^{\circ}45'$  -  $124^{\circ}30'$  Bujur Timur. Wilayah daratan Sulawesi Tenggara luasnya  $38.140 \text{ km}^2$  ( $3.814.000 \text{ ha}$ ) kalah dominan dengan wilayah perairan yakni seluas  $110.000 \text{ km}^2$  ( $11.000.000 \text{ ha}$ ).



Gambar 4.1

Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara

Secara administrasi Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 17 (tujuh belas) kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Utara, Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten

Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Muna, kabupaten Muna Barat, Kabupaten Wakatobi, dan Kota Bau-Bau.

Provinsi Sulawesi Tenggara terletak di Tenggara Pulau Sulawesi, dengan bagian barat dibatasi oleh Teluk Bone. Bagian utara wilayah Sulawesi Tenggara ini merupakan daerah pegunungan. Kabupaten Konawe Selatan adalah kabupaten dengan wilayah terluas yaitu 5.779,47 km<sup>2</sup> sedangkan Kota Bau-Bau merupakan kota dengan wilayah terkecil yaitu 221,00 km<sup>2</sup>.

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Tenggara Per Kabupaten/Kota Tahun 2020

Kecamatan	2021
	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Buton	115.207
Muna	215.527
Konawe	257.001
Kolaka	237.587
Konawe Selatan	308.524
Bombana	150.706
Wakatobi	111.402
Kolaka Utara	137.659
Buton Utara	66.653
Konawe Utara	67.871
Kolaka Timur	120.699
Konawe Kepulauan	37.050
Muna Barat	84.590
Buton Tengah	114.773
Buton Selatan	95.261
Kota Kendari	345.107
Kota Bau-Bau	159.248
<b>PROVINSI SULAWESI TENGGARA</b>	<b>2.624.875</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara 2020

#### 4.2 Sarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

Sarana yang digunakan di Pelabuhan Penyeberangan Kendari yaitu KMP. Bahteramas yang melayani lintasan Kendari-Langara

Tabel 4.2 Karakteristik KMP. Bahteramas

Uraian	Kegiatan
Nama Kapal	KMP. Bahteramas
Tempat Pembuatan/galangan	PT. Mariana Bahagia Palembang
Tahun Pembuatan	2008
Lintasan	Kendari-Langara
Tipe Kapal	Ferry Ro-Ro
Ukuran Utama	
Panjang Seluruh (LOA)	45,50 Meter
Panjang (LBP)	40,15 Meter
Lebar(B)	12,60 Meter
Dalam (D)	3,20 Meter
Sarat Air (d)	2,15 Meter
GRT/NT	628GT – 189 NT
Kapasitas Muat	
Pintu Rampa Haluan	Panjang: 6 Meter Lebar: 4 Meter
Pintu Rampa Buritan	Panjang: 6 Meter Lebar: 4 Meter
Car Deck	
Tinggi Car Deck Haluan	3,50 Meter
Tinggi Car Deck Buritan	3,50 Meter

Sumber: PT.ASDP Indonesia Ferry(persero) cabang Baubau

#### 4.3 Prasarana Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

Prasana merupakan hal yang sangat penting dalam pelayanan pelaksanaan kegiatan angkutan penyeberangan yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Kendari.

## 1. Dermaga

Dermaga adalah tempat berlangsungnya kegiatan bongkar muat barang dan naik turunnya penumpang dari dan ke atas kapal. Dermaga yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Kendari dalam kondisi kurang baik.



*Sumber: Tim PKL Provinsi Sulawesi Tenggara 2021*

Gambar 4.2 Dermaga Pelabuhan Penyeberangan Kendari

## 2. *Catwalk*

*Catwalk* merupakan jembatan yang menghubungkan dermaga untuk menuju dolphin/mooring dolphin dari dermaga.



*Sumber: Tim PKL Provinsi Sulawesi Tenggara 2021*

Gambar 4.3 *Catwalk* Pelabuhan Penyeberangan Kendari

### 3. *Bolder*

*Bolder* merupakan perangkat pelabuhan untuk menambatkan kapal di dermaga atau perangkat untuk mengikatkan tali dikapal.



*Sumber: Tim PKL Provinsi Sulawesi Tenggara 2021*

Gambar 4.4 *Bolder* Pelabuhan Penyeberangan Kendari

### 4. *Fender*

*Fender* merupakan bantalan yang di tempatkan di depan dermaga sehingga *fender* tersebut akan berfungsi menyerap energi benturan antara kapal dan dermaga.



*Sumber: Tim PKL Provinsi Sulawesi Tenggara 2021*

Gambar 4.5 *Fender* di Pelabuhan Penyeberangan Kendari

#### 5. *Gangway*

*Gangway* merupakan akses jalan penumpang dari pintu atau portal menuju ke dermaga. *Gangway* di Pelabuhan Kendari digunakan untuk pedagang menjual dagangannya.



*Sumber: Tim PKL Provinsi Sulawesi Tenggara 2021*

Gambar 4.6 *Gangway* Pelabuhan Penyeberangan Kendari

## 6. Rumah *Movable Bridge*

Rumah *Movable Bridge* merupakan tempat untuk mengontrol *movible bridge*. Namun rumah *movible bridge* yang ada di Pelabuhan Penyeberangan Kendari dalam kondisi rusak tidak digunakan lagi.



Sumber: Tim PKL Provinsi Sulawesi Tenggara 2021

Gambar 4.7 Rumah *Movable bridge* Pelabuhan Penyeberangan Kendari

## 7. Ruang Tunggu

Ruang tunggu merupakan tempat penumpang atau calon penumpang menunggu atau beristirahat dalam menunggu kedatangan kapal setelah dan sebelum membeli tiket.



Sumber: Tim PKL Provinsi Sulawesi Tenggara 2021

Gambar 4.8 Ruang Tunggu Pelabuhan Penyeberangan Kendari

## 8. Lapangan Parkir

Lapangan parkir merupakan tempat pemberhentian kendaraan baik dalam jangka pendek ataupun lama.



*Sumber: Tim PKL Provinsi Sulawesi Tenggara 2021*

Gambar 4.9 Lapangan Parkir Siap Muat Pelabuhan Penyeberangan Kendari



*Sumber: Tim PKL Provinsi Sulawesi Tenggara 2021*

Gambar 4.10 Lapangan Parkir Pengantar Penjemput Pelabuhan Penyeberangan Kendari

## 9. Kantor Administrasi

Kantor administrasi merupakan kantor yang berfungsi sebagai pelayanan dan pengelolaan pelabuhan.





*Sumber: Tim PKL Provinsi Sulawesi Tenggara 2021*

Gambar 4.11 Kantor Administrasi Pelabuhan Penyeberangan Kendari

## 10. Loket Terpadu

Pembelian tiket di Pelabuhan Kendari dikelola secara terpadu



*Sumber: Tim PKL Provinsi Sulawesi Tenggara 2021*

Gambar 4.12 Loket Terpadu Pelabuhan Penyeberangan Kendari

## 11. Mushollah

Mushollah merupakan tempat ibadah bagi penumpang



*Sumber: Tim PKL Provinsi Sulawesi Tenggara 2021*

Gambar 4.13 Musholah Pelabuhan Penyeberangan Kendari

## 12. Toilet

Toilet yang terdapat di Pelabuhan Kendari tidak bisa digunakan karena toilet tersebut dikunci



*Sumber: Tim PKL Provinsi Sulawesi Tenggara 2021*

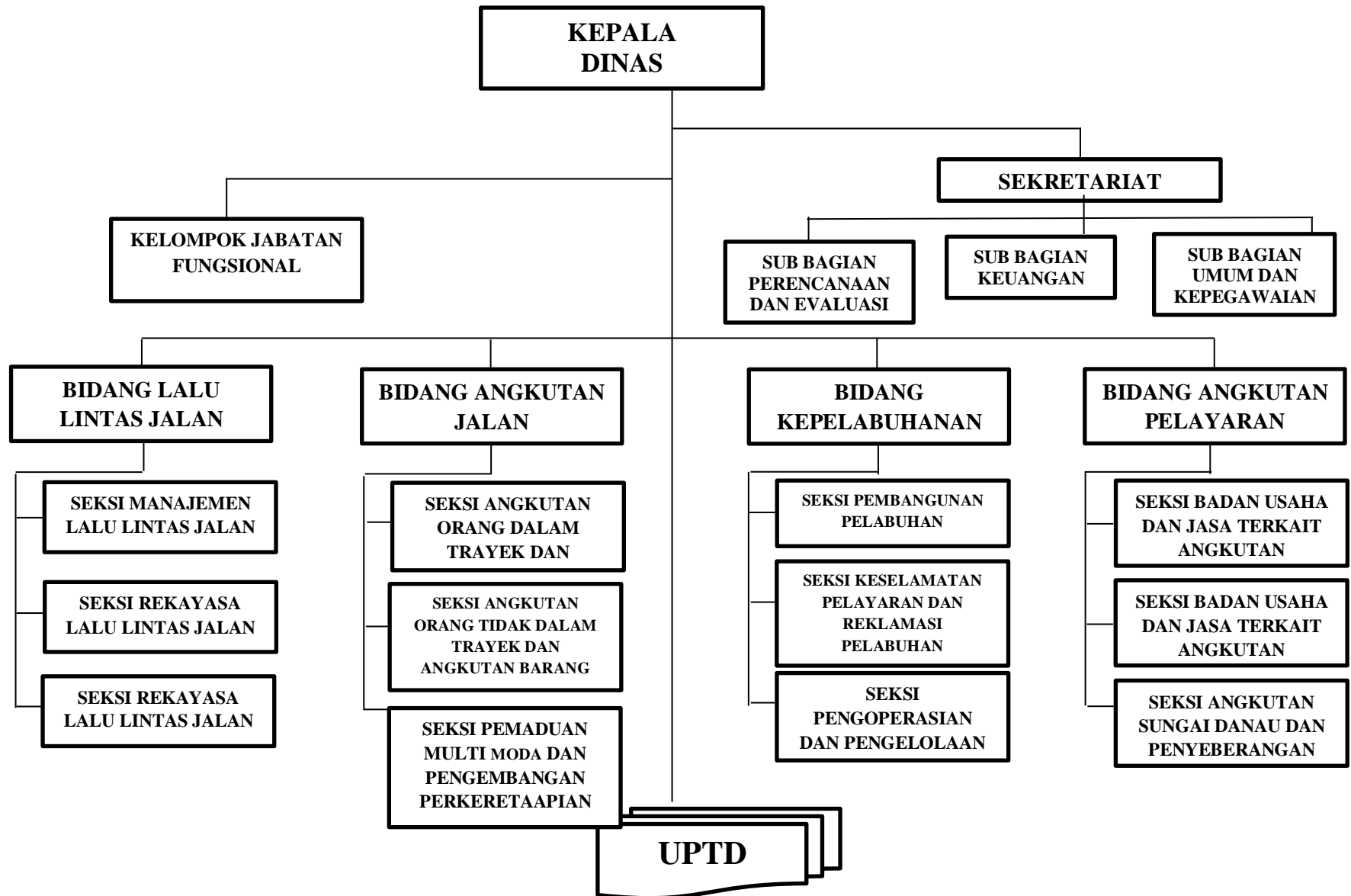
Gambar 4.14 Toilet Pelabuhan Penyeberangan Kendari

## 4.4 Instansi Pembina Transportasi

Pembina angkutan di Pelabuhan Penyeberangan Kendari-Langara adalah Balai Pengelola Transportasi Darat sebagai pengawas operator pelabuhan dan kapal sedangkan yang menjadi operator Pelabuhan adalah UPTD Pelabuhan Kendari-Wawoni dibawah naungan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dan yang menjadi operator kapal adalah PT. ASDP Cabang Bajoe.

Berikut struktur organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan fokus sub urusan Lalu Lintas Angkuan Jalan dan Pelayaran, wilayah geografis kepulauan dengan status tipe A (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 139 Tahun 2016), dan atau kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara (Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 66 Tahun 2016).

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



Gambar 4.15 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara

Adapun tugas dan wewenang Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah

Fungsi Kepala Dinas :

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintah Bidang Perhubungan
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan
- d. Pelaksanaan administrasi dinas
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait tugas dan fungsinya

2. Sekretaris

Sekretaris dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengekoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas
- b. Pengekoordinasian penyusunan program dan pelaporan
- c. Sekretaris dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, hukum, dan keuangan dalam lingkungan Dinas.
- d. Sekretaris mempunyai fungsi:
- e. Pengekoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas
- f. Pengekoordinasian penyusunan program dan pelaporan

1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Sub Bagian Program dipimpin oleh kepala subagian yang mempunyai tugas mebantu sekretaris dalam merencanakan dan melakukan evaluasi penyusunan program, penyajian data dan informasi, serta penyusunan laporan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum, kepegawaian, dan hokum dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan pengahpusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum.

3) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian keuangan yang mempunyai tugas mebantu sekretaris dalam mengumpulkan bahasn dan melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.

3. Bidang Lalu Lintas Jalan

Bidang Lalu Lintas Jalan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis lalu lintas jalan.

Fungsi Bidang Lalu Lintas Jalan sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Lalu Lintas Jalan
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Lalu Lintas Jalan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Lalu Lintas Jalan
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Lalu Lintas Jalan, dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

1) Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan

Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mepunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen

2) Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan

Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis rekayasa.

3) Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Seksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipimpin oleh Kepala seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

4. Bidang Angkutan Jalan

Bidang Angkutan jalan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis lalu lintas jalan.

Fungsi Bidang Angkutan Jalan sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Angkutan Jalan
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Angkutan Jalan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Angkutan Jalan
- d. Pelaksanaan administrasi Bidang Angkutan Jalan, dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

1) Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal

Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu kepala Bidang Angkutan Jalan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan Pelaksanaan kebijakan Teknis Angkutan Orang Dalam Trayek dan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Teknis terminal tipe B.

2) Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang

Seksi Angkutan Orang Tidak dalam Trayek dan Angkutan Barang dipimpin oleh Kepala seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Angkutan Jalan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan teknis angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang.

3) Seksi Pemaduan Multi Moda dan Pengembangan Perkeretaapian

Seksi pemaduan Multi Moda dan pengembangan perkeretaapian dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Angkutan Jalan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan system dan multimoda serta pengembangan perkertapaian melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perkeretaapian.

5. Bidang Kepelabuhanan

Bidang Kepelabuhanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kepelabuhanan.

Fungsi Bidang Kepelabuhanan sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kepelabuhanan
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Kepelabuhanan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kepelabuhanan
- d. Pelaksanaan administrasi bidang kepelabuhanan, dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

1) Seksi pembangunan pelabuhan

Seksi pembangunan pelabuhan dipimpin oleh Kepala Seksi pembangunan Pelabuhan yang mempunyai tugas membantu kepala Bidang Kepelabuhanan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan pelabuhan

2) Seksi keselamatan pelayaran dan reklamasi pelabuhan

Seksi keselamatan pelayaran dan reklamasi pelabuhan dipimpin oleh Kepala Seksi keselamatan pelayaran dan reklamasi pelabuhan yang mempunyai tugas membantu kepala Bidang Kepelabuhanan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis keselamatan pelayaran dan reklamasi pelabuhan.



3) Seksi pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan

Seksi pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan dipimpin oleh Kepala Seksi pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan yang mempunyai tugas membantu kepala Bidang Kepelabuhanan dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan.

6. Bidang Angkutan Pelayaran

Bidang Angkutan Pelayaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kepelabuhanan.

Fungsi Bidang Angkutan Pelayaran sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Angkutan Pelayaran
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Angkutan Pelayaran
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pelayaran
- d. Pelaksanaan administrasi bidang Angkutan Pelayaran, dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

1) Seksi Badan Usaha Dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran

Seksi Badan Usaha Dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Angkutan Pelayaran dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran

2) Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat

Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Angkutan Pelayaran dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Angkutan Pelayaran Rakyat.

3) Seksi Angkutan Sungai Danau Dan Penyeberangan.

Seksi Angkutan Angkutan Sunagi Danau Dan Penyeberangan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Angkutan Pelayaran dalam melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Angkutan Sunagi Danau Dan Penyeberangan.

## 4.5 Produktivitas Angkutan

### 4.5.1 Produktivitas 5 Tahun Terakhir

Tabel 4.3 Produktivitas Pelabuhan 5 Tahun terakhir Pada Pelabuhan Penyeberangan Kendari-Langara

No	Tahun	Produktivitas												
		PNP		Kendaraan Gol.										
		D	A	I	II	III	IV A	IV B	V A	V B	VI A	VI B	VII	VIII
1	2016	71.294	1.848	-	19.063	5	1.373	-	-	785	-	18	17	26
2	2017	118.147	2.537	-	25.656	2	1.668	-	-	765	-	21	34	35
3	2018	144.672	2.256	6	33.199	-	2.111	-	-	803	-	112	35	28
4	2019	123.376	1.649	7	35.053	2	2.427	-	-	678	-	63	77	38
5	2020	120.214	2.574	24	29.570	2	2.233	-	-	451	-	60	24	22
Jumlah		577.703	10.864	37	142.541	11	9.812	-	-	3.482	-	274	187	149

Sumber: PT. ASDP Indonesia Ferry (persero) cabang Baubau

Tabel 4.4 Produktivitas Keberangkatan Penumpang dan Barang Selama 15 Hari di Lintasan Kendari-Langara

No.	Tanggal	KEBERANGKATAN											
		PNP	Kendaraan Golongan										
			I	II	III	IVA	IVB	VA	VB	VIA	VIB	VII	VIII
1	9 Maret 2021	264	-	59	-	4	-	-	-	-	-	-	-
2	10 Maret 2021	104	-	38	-	5	-	-	-	-	-	-	-
3	11 Maret 2021	232	-	49	-	9	-	-	-	-	-	-	-
4	12 Maret 2021	110	-	28	-	3	-	-	-	-	-	-	-
5	13 Maret 2021	220	-	54	-	8	-	-	-	-	-	-	-
6	14 Maret 2021	245	-	77	-	7	-	-	-	-	-	-	-
7	15 Maret 2021	291	-	68	-	11	-	-	-	-	-	-	-
8	16 Maret 2021	153	-	32	-	6	-	-	-	-	-	-	-
9	17 Maret 2021	300	-	66	-	13	-	-	-	-	-	-	-
10	18 Maret 2021	200	-	37	-	5	-	-	-	-	-	-	-
11	19 Maret 2021	250	-	63	-	11	-	-	-	-	-	-	-
12	20 Maret 2021	108	-	28	-	3	-	-	-	-	-	-	-
13	21 Maret 2021	388	-	82	-	11	-	-	-	-	-	-	-
14	22 Maret 2021	178	-	40	-	7	-	-	-	-	-	-	-
15	23 Maret 2021	230	-	54	-	8	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: PT.ASDP Indonesia Ferry (persero) cabang baubau

## 4.6 Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

### 4.6.1 Lintas Penyeberangan Perintis

Lintasan perintis merupakan lintasan yang mendapatkan subsidi dari pemerintah untuk dapat di layani guna untuk tetap memberikan pelayanan angkutan terhadap daerah-daerah yang permintaan akan angkutan masih sangat rendah dan mbeuka kases bagi daerah-daerah yang masih terisolir.

Angkutan Penyeberangan di Provinsi Sulawesi Tenggara sampai saat ini telah memiliki trayek resmi yang merupakan ketetapan dari pemerintah darrah setempat. Terdapat 13 lintasan penyeberangan dalam satuan pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni sebagai berikut:

Tabel 4.5 Lintasan Penyeberangan Satuan Pelayanan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Lintasan	Jumlah Kapal	Waktu Tempuh Rata-rata (Menit)
1	Torobulu-Tampo	2	180
2	Kendari-Langara	1	180
3	Baubau-Waara	2	20
4	Kamaru-Wanci	1	270
5	Labuan-Amolengo	1	45
6	Dongkala-Mawasangka	1	60
7	Baubau-Siompu	1	120
8	Baubau-Kasipute	1	-
9	Baubau- Siompu	1	120
10	Baubau-Tolandona	1	50
11	Tondasi-Sikeli	1	480
12	Kasipute-Tondasi	1	120-180

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, 2021



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara

Gambar 4.16 Lintasan Penyeberangan Pada Provinsi Sulawesi Tenggara

